

# TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP DAKWAAN JAKSAPENUNTUT UMUM NO.REG.PERKARA:PDS- 03/MALANG/FT.1/12/2009 TINDAK PIDANA KORUPSI

 Oleh: DWI NURWIANTO ( 06400147 )

Law

Dibuat: 2011-02-10 , dengan 5 file(s).

**Keywords:** Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Tindak Pidana Korupsi

## ABSTRAKSI

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat permasalahan tentang apa dasar alasan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menerapkan dakwaan subsidiaritas dalam perkara nomor : PDS-03/MALANG/FT.1/12/2009 apakah sudah memenuhi kriteria dalam pasal 143 KUHAP dan upaya Hukum apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum jika surat dakwaan reg.perkara nomor : PDS-03.MALANG/FT.1/12/2009 dinyatakan oleh hakim dalam putusan selanya batal demi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya diketahui bahwasannya dasar alasan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menerapkan dakwaan subsidiaritas dalam perkara nomor : PDS-03/MALANG/FT.1/12/2009 apakah sudah memenuhi kriteria dalam pasal 143 KUHAP dan upaya Hukum apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum jika surat dakwaan reg.perkara nomor : PDS-03.MALANG/FT.1/12/2009 dinyatakan oleh hakim dalam putusan selanya batal demi hukum. Dilihat dari Undang-Undang No.3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan evaluasi penulis pelaksanaan bimbingan teknis penuntutan serta pemantauan terhadap laporan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi ke pengadilan negeri terdapat ketidakseragaman atas bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ada yang disusun secara alternative demikian pula dalam surat dakwaan ada yang mencantumkan Pasal 18 dan ada yang tidak mencantumkan.

## ABSTRACT

In this study, the researchers raised the issue of what grounds used by prosecutor's in applying subsidiarity indictment in case number: PDS-03/MALANG/FT.1/12/2009 whether it meets the criteria in Article 143 Criminal Procedure Law and the efforts of what conducted by the prosecutor if the indictment reg.perkara number: PDS-03.MALANG/FT.1/12/2009 expressed by judges in selanya decision null and void. This study using a normative juridical approach and Qualitative descriptive methods.

Their work is known Praise be to Allaah grounds used by prosecutors in applying subsidiarity indictment in case number: PDS-03/MALANG/FT.1/12/2009 whether it meets the criteria in Article 143 Criminal Procedure Code and the efforts of Justice what the prosecutor general, if an indictment reg.perkara number: PDS-03.MALANG/FT.1/12/2009 expressed by judges in selanya decision null and void. Viewed from the Act No.3 of 1971 on Eradication of Corruption and Law No. 31 Year 1999 on Eradication of Corruption. Based on the evaluation of the implementation of technical guidance writer prosecution and monitoring of the delegation report cases of corruption to the district court found ketidakseragaman top form indictment made by the prosecutor for violation of Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption in this regard to Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 is arranged in alternative as well as in the indictment is a list of Article 18 and there are no lists.

Keywords: Indictment, Prosecutor General, Corruption